

ANALISIS IMPLEMENTASI *E-PARTICIPATION* DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA BERDASARKAN LITERATURE REVIEW

Pebriyanto¹, Jumanah², Sutoto³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

^{2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Email: pebriyanto7585@gmail.com, jumanah1011@gmail.com, sutoto.stiaban@gmail.com

*Korespondensi : pebriyanto7585@gmail.com

(Submission 28-10-2024, Revisions 04-12-2024, Accepted 27-12-2024)

Abstract

This study was conducted to analyze the implementation of E-participation in public policy in Indonesia with a focus on the potential, challenges, and impacts on the quality of public policy. E-participation as a policy-making process that involves public participation facilitated by digital technology has been implemented through various platforms such as LAPOR! and E-Musrenbang. This study uses a systematic literature review method of previous studies published between 2014 and 2024 to conduct the analysis. The results of the study indicate that although there has been an increase in the number of public participation through digital platforms, the effectiveness and impact of E-participation are still limited. The main challenges of implementing E-participation include unequal internet access, low levels of digital literacy, and bureaucratic resistance. In addition, coordination between government agencies in managing the E-participation platform is also a significant obstacle. Although E-participation has great potential to increase transparency, accountability, and inclusiveness of public policy, the improvement of policy quality has not been optimal due to the lack of follow-up to public input. To maximize the potential of E-participation, it is necessary to improve digital infrastructure, strengthen digital literacy, and develop more effective and transparent feedback mechanisms in managing public participation.

Keywords: *electronic participation; digital technology; public policy; digital literacy*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap implementasi *E-participation* dalam kebijakan publik di Indonesia dengan fokus pada potensi, tantangan, serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik. *E-participation* sebagai proses pembuatan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan difasilitasi oleh teknologi digital telah diimplementasikan melalui berbagai platform seperti *LAPOR!* dan *E-Musrenbang*. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sistematis terhadap studi terdahulu yang telah diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024 untuk melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah partisipasi masyarakat melalui platform digital, efektivitas dan dampak *E-participation* masih terbatas. Tantangan utama implementasi *E-participation* meliputi ketidakmerataan akses internet, rendahnya tingkat literasi digital, dan resistensi birokrasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mengelola platform *E-participation* juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun *E-participation* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan publik, peningkatan kualitas kebijakan belum optimal karena kurangnya tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi *E-participation*, diperlukan peningkatan infrastruktur digital, penguatan literasi digital, serta pengembangan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *e-participation; teknologi digital; kebijakan publik; literasi digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang difasilitasi melalui platform digital, dikenal sebagai *E-participation*. Melalui *E-Participation*, masyarakat mendapatkan peluang untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti *e-petition*, konsultasi online, dan forum diskusi digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan memantau kebijakan secara *real-time* (Medaglia, 2017). Sudah banyak negara yang telah berhasil mengadopsi *E-participation* sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan, namun di Indonesia *E-participation* dinilai masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan *E-Participation* di Indonesia, diantaranya adalah: *Pertama*, penetrasi internet yang tidak merata. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 77,02%. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 73,7%. Namun, angka ini diwarnai dengan penetrasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Di daerah perkotaan, terdapat 89,02% penduduk memiliki akses internet, sementara di daerah pedesaan, angkanya hanya mencapai 64,65%.

Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan partisipasi digital yang signifikan, di mana hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat terlibat dalam proses kebijakan secara digital. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari data penetrasi internet pada Tabel 1.

Tabel 1. Penetrasi Internet di Wilayah Geografis Indonesia Tahun 2022

Wilayah	Persentase Penetrasi Internet (%)
Perkotaan	89,02
Pedesaan	64,65
Pulau Jawa	82,11
Pulau Sumatera	70,54
Pulau Kalimantan	61,23
Pulau Sulawesi	56,78
Pulau Papua	45,67

(Sumber: APJII, 2022)

Data pada Tabel 1 menunjukkan, meskipun akses internet di Pulau Jawa cukup tinggi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hal ini bisa berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik yang dilakukan secara digital.

Kedua, literasi digital masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman tentang cara menggunakan teknologi secara efektif, etis, dan aman untuk berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital yang memadai. Sementara itu, 45% memiliki literasi digital dasar, dan 25% tidak memiliki literasi digital sama sekali. Data ini bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Literasi Digital Masyarakat Indonesia Tahun 2021

Kategori Literasi	Persentase Masyarakat (%)
Literasi Digital Tinggi	30
Literasi Digital Dasar	45
Tidak Memiliki Literasi	25

(Sumber: BPS, 2021)

Data pada Tabel 2 menunjukkan, hampir separuh dari masyarakat Indonesia masih berada pada kategori literasi digital dasar atau bahkan tidak memiliki literasi digital sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur internet tersedia, banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan teknologi ini untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Menurut BPS (2021), literasi digital yang rendah bisa menghambat kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam konteks partisipasi kebijakan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan literasi digital, seperti program "*Digital Talent Scholarship*" dan "*Garda Digital Nasional*" yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan dan daerah tertinggal. Hingga akhir tahun 2022, program ini telah menjangkau lebih dari 200.000 peserta di seluruh Indonesia (Kominfo, 2022). Namun, jumlah ini masih jauh dari target yang diharapkan, mengingat populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.

Ketiga, resistensi birokrasi terhadap perubahan. Kondisi ini juga menjadi tantangan besar dalam implementasi *E-participation* di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Purwanto dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintah yang masih ragu untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat *E-participation*, kekhawatiran akan kehilangan kontrol atas proses kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mampu mengelola platform digital. Resistensi ini sering kali diperparah oleh kurangnya dukungan politik dan kebijakan yang mendukung implementasi *E-participation* secara efektif.

Survei yang dilakukan oleh *Katadata Insight Center* pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa sebanyak 45% pejabat pemerintah daerah menyatakan kurang percaya diri untuk menggunakan platform digital dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menyebutkan, kurangnya pelatihan dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi *E-participation*. Selain itu, 35% responden mengaku khawatir dengan aspek keamanan dan privasi data, sementara 20% lainnya merasa bahwa platform digital kurang efektif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Data survei tersebut bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hambatan Adopsi E-Participation Menurut Survei Tahun 2021

Hambatan	Persentase Pejabat Pemerintah (%)
Kurangnya Pelatihan dan Dukungan	45
Kekhawatiran tentang Keamanan Data	35
Platform Digital Kurang Efektif	20

(Sumber: *Katadata Insight Center*, 2021)

Keempat, keamanan dan privasi data. Masalah keamanan dan privasi data menjadi isu yang krusial dalam implementasi *E-participation*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2022, sebanyak 65% masyarakat Indonesia menyatakan kekhawatiran mereka terhadap keamanan data pribadi saat menggunakan layanan digital pemerintah. Hal ini menjadi tantangan besar, karena kepercayaan masyarakat terhadap keamanan platform *E-Participation* sangat penting untuk memastikan partisipasi yang aktif dan bermakna. Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan adanya beberapa kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus

kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan lebih dari 279 juta data pribadi pengguna (APJII, 2022).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022 yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka atas data pribadi, serta kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi untuk mendukung penerapan regulasi ini secara efektif (Kominfo, 2022). Data tentang kebocoran data dan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kebocoran Data dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan Data di Indonesia

Tahun	Kasus Kebocoran Data	Jumlah Data yang Bocor (Juta)	Persentase Masyarakat yang Khawatir (%)
2019	2	15	55
2020	4	30	60
2021	6	40	63
2022	3	279	65

(Sumber: APJII, 2022; Kominfo, 2022)

Data pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa jumlah kasus kebocoran data mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, yang kemudian diikuti dengan lonjakan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk memastikan keamanan dan privasi data dalam layanan digital, termasuk dalam platform *E-participation*.

Secara keseluruhan, bisa dinyatakan bahwa tantangan dalam implementasi *E-participation* di Indonesia mencakup ketidakmerataan akses internet, rendahnya literasi digital, resistensi birokrasi, serta kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini, seperti melalui program pelatihan literasi digital dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses kebijakan publik yang difasilitasi oleh teknologi digital.

Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, *E-participation* memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta transparansi dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap *E-participation* agar dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik *E-Participation* di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat.

• Kerangka Teori

1) Konsep *E-participation*

E-participation adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang difasilitasi oleh teknologi digital. *E-participation* memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara lebih mudah dan efektif, melalui penggunaan berbagai platform digital seperti media sosial, *e-petition*, dan forum konsultasi online (Macintosh et al., 2016). Dalam konteks pemerintahan, *E-participation* menawarkan kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat transparansi, serta memperbaiki kualitas kebijakan yang dihasilkan. Menurut Medaglia (2017), *E-participation* tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui umpan balik langsung dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *E-participation* dapat dibedakan menjadi tiga tingkat keterlibatan, yaitu: *e-informing*, *e-consulting*, dan *e-decision making*. *E-informing* adalah bentuk partisipasi

yang paling dasar, di mana pemerintah menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang sedang dibahas. *E-consulting* melibatkan interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik atau pendapat mereka tentang isu-isu kebijakan. *E-decision making* adalah tingkat partisipasi yang paling tinggi, di mana masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan kebijakan melalui mekanisme seperti referendum *online* atau voting digital. Setiap tingkat partisipasi ini memiliki tantangan dan peluang tersendiri, tergantung pada kesiapan teknologi dan budaya partisipasi masyarakat.

Selain itu, *E-participation* juga dapat dibedakan berdasarkan jenis teknologinya, seperti penggunaan media sosial, portal pemerintah, atau aplikasi khusus yang dirancang untuk tujuan partisipasi (Susha et al., 2015). Media sosial sering digunakan untuk memobilisasi masyarakat dan menyebarkan informasi dengan cepat. Portal pemerintah biasanya digunakan untuk konsultasi formal dan umpan balik, sementara aplikasi khusus dirancang untuk partisipasi yang lebih spesifik, seperti petisi *online* atau konsultasi kebijakan secara real-time. Keberhasilan implementasi *E-participation* sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini diintegrasikan dengan sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana masyarakat diajak untuk terlibat secara aktif.

2) Perkembangan *E-participation* di Indonesia

Di Indonesia, *E-participation* mulai mendapatkan perhatian setelah diperkenalkannya berbagai inisiatif pemerintah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi digital. Salah satu inisiatif yang paling dikenal adalah *LAPOR!* (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), sebuah platform yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan mereka tentang layanan publik secara *online* (Purwanto & Pratama, 2020). Sejak diluncurkan pada tahun 2014, *LAPOR!* telah menerima lebih dari 1 juta laporan dari masyarakat, yang mencakup berbagai isu mulai dari pelayanan kesehatan hingga infrastruktur (Kominfo, 2021).

Meskipun ada peningkatan penggunaan teknologi digital untuk partisipasi publik, namun tantangan yang dihadapi terhadap partisipasi masyarakat dalam laporan pelayanan publik masih besar. Menurut survei yang dilakukan *Katadata Insight Center* (2021), hanya 35% masyarakat Indonesia yang merasa bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan masukan yang diberikan melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun platform seperti *LAPOR!* sudah ada, efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kurangnya literasi digital dan ketidakmerataan akses internet di berbagai wilayah juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan *E-participation* yang inklusif.

Perkembangan *E-participation* di Indonesia juga dapat dilihat dari jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Data APJII (2022) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 77,02%. Ini meningkat dari angka 73,7% pada tahun 2021. Meskipun demikian, partisipasi digital masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, dengan 89,02% penduduk perkotaan memiliki akses internet, sementara di daerah pedesaan hanya 64,65%. Ketimpangan ini menyebabkan partisipasi yang tidak merata, di mana hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat terlibat dalam proses kebijakan secara digital. Data pengguna internet tersebut bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia dari 2018-2022 Berdasarkan Wilayah Geografis

Tahun	Jumlah Pengguna Internet (Juta)	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
2018	171,17	81,78	55,55
2019	196,71	84,47	59,54
2020	212,35	87,13	62,47
2021	237,56	88,95	63,53
2022	250,20	89,02	64,65

(Sumber: APJII, 2018-2022)

Data pada Tabel 7 memperlihatkan, meskipun jumlah pengguna internet terus meningkat, persentase akses internet di daerah pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ketimpangan ini perlu diatasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses *E-participation*.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *E-participation*

Keberhasilan *E-participation* tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti literasi digital, dukungan politik, dan desain platform. Literasi digital masyarakat merupakan faktor kunci yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam platform digital (Park & Joo, 2020). Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat tidak akan mampu memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi, berkomunikasi secara efektif, atau menyampaikan pendapat mereka secara konstruktif. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital melalui program pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan bermakna.

Dukungan politik juga memiliki peran penting dalam keberhasilan *E-participation*. Menurut studi yang dilakukan oleh Lindgren dan van Veenstra (2018), *E-participation* lebih mungkin berhasil jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dari pemerintah. Tanpa dukungan politik yang memadai, inisiatif *E-participation* cenderung tidak berkelanjutan dan hanya menjadi formalitas. Selain itu, resistensi birokrasi terhadap perubahan teknologi sering kali menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi *E-participation*. Banyak pejabat pemerintah yang masih enggan untuk mengadopsi teknologi digital karena takut kehilangan kontrol atas proses kebijakan atau karena kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi ini (Purwanto & Pratama, 2020).

Desain platform juga berpengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat. Menurut Susha et al., (2015), platform *E-participation* yang efektif harus memiliki beberapa karakteristik, seperti *user-friendly*, transparan, interaktif, dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Platform yang sulit digunakan atau tidak transparan cenderung tidak menarik bagi masyarakat, sehingga partisipasi yang terjadi hanya bersifat simbolis. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa platform *E-participation* yang digunakan dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau bahasa.

4) Tantangan Implementasi *E-participation* di Negara Berkembang

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam implementasi *E-participation* dibandingkan dengan negara maju. Tantangan utama adalah ketidakmerataan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan resistensi birokrasi (Purwanto & Pratama, 2020). Selain itu, masalah infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil dan biaya perangkat yang tinggi juga menjadi hambatan signifikan. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil (APJII, 2022).

Selain masalah teknis, faktor budaya juga berperan penting. Di banyak negara berkembang, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih rendah karena kurangnya kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat sering kali merasa bahwa pendapat mereka tidak akan didengar atau tidak akan berdampak pada kebijakan yang dihasilkan (Susanto & Goodwin, 2018). Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam platform *E-participation*, meskipun teknologi tersedia.

Tantangan lain adalah kurangnya kapasitas pemerintah untuk mengelola partisipasi digital. Banyak platform *E-participation* yang dibangun tanpa perencanaan yang matang dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola platform tersebut secara efektif (Wirtz et al., 2018). Akibatnya, banyak masukan dari masyarakat yang tidak ditanggapi dengan baik atau tidak diintegrasikan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap *E-participation* menurun, dan mereka menjadi enggan untuk berpartisipasi lebih lanjut.

5) Dampak *E-participation* terhadap Kualitas Kebijakan Publik

E-participation dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kebijakan publik jika diterapkan dengan baik. Menurut Fung (2015), partisipasi digital dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan memasukkan perspektif yang lebih beragam dari masyarakat. Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, *E-participation* juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat dengan mudah mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan umpan balik jika ada penyimpangan (Meijer, 2016).

Namun, untuk mencapai dampak positif tersebut, *E-participation* harus dilakukan dengan cara yang inklusif, transparan, dan responsif. Partisipasi yang hanya bersifat simbolis atau formalitas tidak akan memberikan dampak nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan (Michels & De Graaf, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa platform *E-participation* yang digunakan benar-benar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan dan bahwa setiap masukan yang diberikan diperhitungkan dalam keputusan yang diambil. Bagaimana dampak E-Participation terhadap kualitas kebijakan publik, bisa dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Dampak *E-Participation* Terhadap Kualitas Kebijakan Publik di Beberapa Negara Berkembang Berdasarkan Studi Kasus

Negara	Dampak Terhadap Kebijakan	Kualitas Kebijakan (%)
India	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	75
Brasil	Responsivitas kebijakan meningkat	70
Indonesia	Partisipasi masih rendah, masukan masyarakat tidak diintegrasikan dengan baik	50
Filipina	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan	65
Afrika Selatan	Kebijakan lebih inklusif dan partisipatif	72

(Sumber: Meijer (2016); Fung (2015); Purwanto & Pratama (2020))

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, meskipun *E-participation* dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kebijakan, namun implementasinya masih perlu diperbaiki, termasuk Indonesia. Pemerintah perlu berupaya lebih keras untuk mengintegrasikan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sistematis untuk mengeksplorasi konsep, perkembangan, tantangan, dan dampak *E-participation* dalam kebijakan publik di Indonesia. Menurut Vindrola-Padros & Johnson (2020), *literature review* merupakan metode sistematis untuk mensintesis penelitian sebelumnya setelah pengumpulan data dilakukan. Proses ini dimulai dengan membaca sejumlah literatur, memahami, mengkritisi, dan memberikan ulasan terhadap literatur yang mendukung penelitian.

Literature review yang baik harus mencakup evaluasi terhadap temuan-temuan baru serta kualitas dari penelitian ilmiah yang ada. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian yang relevan dalam kurun waktu tertentu (Snyder, 2019). *Literatur review* sistematis dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat diandalkan.

Penelitian ini fokus pada literatur yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024 untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan relevan dengan konteks dan perkembangan terbaru. Proses *literature review* dilakukan dengan mengikuti panduan dari *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang terdiri dari empat tahapan utama: identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penyertaan (Moher et al., 2015).

Setiap tahapan dilakukan dengan cermat untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa hanya studi yang memenuhi kriteria inklusi yang dimasukkan dalam analisis. Secara keseluruhan, proses *literature review* yang dilakukan pada penelitian diuraikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Proses *Literature Review*

Tahapan	Kegiatan Utama	Deskripsi
Identifikasi	Mengidentifikasi literatur yang relevan.	Mengidentifikasi penelitian yang terkait dengan topik <i>E-participation</i> dalam kebijakan publik melalui pencarian sistematis di berbagai database akademik. Kata kunci digunakan untuk mempermudah pencarian.
Penyaringan	Menyaring studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.	Studi yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi (misalnya, terbitan sebelum 2014, tidak fokus pada <i>E-participation</i>) dihilangkan dari daftar. Proses penyaringan dilakukan berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci.
Penilaian Kelayakan	Mengevaluasi kualitas metodologi studi yang dipilih.	Setiap studi yang lolos penyaringan dinilai kelayakannya berdasarkan kriteria kualitas metodologi yang ketat, termasuk kesesuaian desain penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.
Penyertaan	Memasukkan studi yang layak ke dalam analisis.	Studi yang memenuhi semua kriteria dan memiliki kualitas metodologi yang memadai dimasukkan ke dalam analisis literatur. Data dari studi ini dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut.
Analisis dan Sintesis	Melakukan analisis tematik dan sintesis data	Studi yang terpilih dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan pola-pola dalam <i>E-participation</i> . Sintesis data dilakukan untuk menarik kesimpulan yang berbasis pada bukti dari berbagai studi.

(Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber)

Penelitian ini dilakukan secara virtual dengan menggunakan database akademik dan platform digital untuk mengakses literatur yang relevan. Database yang digunakan antara lain *Google Scholar*, *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *JSTOR*. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, dari Januari hingga Juni 2024. Selama periode ini, peneliti melakukan pencarian literatur, penyaringan, analisis, dan penulisan laporan hasil penelitian.

Pemilihan jurnal dilakukan dengan kriteria inklusi yang ketat untuk memastikan kualitas studi yang dimasukkan. Kriteria inklusi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2014 hingga 2024.
2. Studi yang membahas *E-participation* dalam konteks kebijakan publik, khususnya di negara berkembang.
3. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi yang terindeks di database Scopus, Web of Science, atau Sinta.
4. Studi yang tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia.

Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "*E-participation*", "*public policy*", "*digital participation*", dan "*Indonesia*". Hasil pencarian yang memenuhi kriteria inklusi kemudian disaring lebih lanjut untuk memastikan bahwa hanya studi yang relevan yang dimasukkan dalam analisis. Proses pencarian dilakukan sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Proses Pencarian Literatur Review

Tahapan	Kegiatan Utama	Deskripsi
Pencarian Awal	Mencari jurnal menggunakan kata kunci spesifik.	Pencarian dilakukan di database akademik seperti <i>Google Scholar</i> , <i>Scopus</i> , <i>ScienceDirect</i> , dan <i>JSTOR</i> dengan menggunakan kata kunci seperti “ <i>E-participation</i> ”, “public policy”, “digital participation”, dan “Indonesia”.
Penerapan Kriteria Inklusi	Menyaring jurnal berdasarkan kriteria inklusi.	Hanya jurnal yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024 yang dipertimbangkan. Selain itu, jurnal harus membahas <i>E-participation</i> dalam konteks kebijakan publik, dan harus tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia
Penerapan Kriteria Eksklusi	Mengeliminsi jurnal yang tidak relevan.	Jurnal yang tidak terindeks di <i>Scopus</i> , <i>Web of Science</i> , atau <i>Sinta</i> , serta jurnal yang tidak terkait langsung dengan topik penelitian dikecualikan dari analisis.
Penyaringan Berdasarkan Abstrak	Menilai relevansi berdasarkan abstrak dan kata kunci.	Abstrak dari setiap jurnal dibaca untuk memastikan kesesuaiannya dengan topik <i>E-participation</i> . Jurnal yang abstraknya tidak relevan dengan fokus penelitian dikecualikan.
Penilaian Kualitas Jurnal	Menilai kualitas metodologi jurnal terpilih.	Setiap jurnal yang lolos penyaringan dinilai kualitas metodologinya berdasarkan kejelasan tujuan, kesesuaian desain penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.
Seleksi Akhir	Memilih jurnal yang memenuhi semua kriteria.	Jurnal yang memenuhi semua kriteria inklusi dan memiliki kualitas metodologi yang memadai dimasukkan ke dalam analisis literatur review. Hanya jurnal-jurnal ini yang digunakan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

(Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber)

HASIL

Setelah melakukan proses *literature review* berdasarkan panduan dari *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), dengan kata kunci “*E-participation*”, “*public policy*”, “*digital participation*”, dan “Indonesia”, diperoleh hasil pencarian yang memenuhi kriteria inklusi. Setelah hasil tersebut disaring untuk memastikan bahwa hanya studi yang relevan yang dimasukkan dalam analisis, selanjutnya disusun berdasarkan kategori yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu penerapan, dukungan dan tantangan serta dampak. Uraian hasil *literature review* terhadap penelitian terdahulu yang ditemukan dalam penelitian ini diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Literature Review Mengenai E-Participation di Indonesia Sepanjang Tahun 2014-2024

Tema Penelitian Sebelumnya	Penerapan	Dukungan dan Tantangan	Dampak
<i>The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia</i> oleh Dinoroy Margonda Aritonang (2017)	Penerapan yang dilakukan belum maksimal disebabkan oleh: 1. Kualitas sistem <i>e-government</i> 2. Penerapan <i>e-government</i> tidak mendorong	Pemerintah kurang optimal memberikan dukungan	Kualitas pelayanan publik belum meningkat optimal meski diterapkan <i>e-government</i>

	<p>perubahan pelayanan</p> <p>3. Implementasi <i>e-government</i> tidak tepat sasaran</p> <p>4. Kendala anggaran yang tepat untuk <i>e-government</i></p> <p>5. Kualitas <i>e-government</i> yang buruk</p>		
<p><i>Transforming Government: People, Process and Policy</i> oleh Rizqa Nulhusna, Puspa Sandhyaduhita, Achmad Nizar Hidayanto, dan Kongkiti Phusavat (2017)</p>	Kualitas sistem dan kualitas pelayanan belum optimal	Pemerintah belum fokus pada kualitas pelayanan, informasi, dan infrastruktur	Pelayanan <i>e-government</i> masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat
<p><i>E-Readiness and The Effectiveness of E-Participation in Indonesia</i> oleh Elisa Susanti, Ridho Harta, Bambang Agus Diana, Sawitri Budi Utami (2021)</p>	Penerapan tidak maksimal karena kondisi Pemerintah Daerah masih terkendala tahap digitalisasi, masih terdapat kesenjangan layanan <i>e-participation</i> , pemberian pelayanan belum maksimal	Pemerintah belum optimal mewujudkan <i>e-participation</i> di berbagai daerah	Pelayanan <i>e-participation</i> belum dirasakan menyeluruh disetiap daerah-daerah di Indonesia
<p><i>Implementation E-Government as a Public Service Innovation in Indonesia</i>, oleh I Farida, A. Lestari (2021)</p>	Penerapan sistem <i>e-government</i> yang utama adalah resistensi dan keragu-raguan ketika menghadapi inovasi baru untuk mendobrak kebiasaan lama.	Pemerintah belum dapat mewujudkan <i>e-government</i> karena masih lemahnya peran kepemimpinan	Pelayanan <i>e-government</i> belum dapat dilakukan secara optimal dengan model <i>bottom-up</i>
<p><i>The Problem of E-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia</i>,</p>	<p>Permasalahan yang ditemukan:</p> <p>1. Penggunaan <i>e-democracy</i> masih terkendala oleh</p>	Pemerintah belum serius untuk menerapkan <i>e-participation</i>	Penerapan <i>e-democracy</i> masih belum optimal

oleh Muhammad Saiful Aziz dan Socia Hasna (2020)	kesenjangan digital di daerah-daerah 2. Belum optimalnya penggunaan <i>e-government</i> oleh pemerintah		
<i>A Study of Government 2.0 Implementation in Indonesia</i> oleh Nur Fitriah Ayuning Budi, Widia Resti Fitriami, Achmad Nizar Hidayanto, Sherah Kurnia (2020)	Permasalahan: 1. Ketersediaan jaringan komunikasi masih terjadi kesenjangan 2. Aplikasi pendukung <i>e-government</i> tidak optimal 3. Implementasi <i>e-government</i> belum optimal	Pemerintah perlu serius membenahi sistem <i>e-government</i>	Pelayanan <i>e-government</i> belum optimal
<i>Challenges and Issues of E-Participation Implementation: A Case Study of E-Complaint Indonesia</i> oleh Annisa Monicha Sari, A. Nizar Hidayanto, Betty Purwandari, Nur Fitriah Ayuning Budi, dan Meidi Kosandi (2018)	Koordinasi pelayanan yang belum optimal, penerapan belum optimal karena terkendala pengetahuan dan keterampilan dari lembaga pemberi pelayanan	Pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan <i>e-government</i>	Penerapan <i>e-government</i> masih banyak kendala sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan

(Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber)

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini didasarkan pada hasil *literature review* terhadap penelitian terdahulu yang dinilai terkait dengan tema implementasi *E-participation* di Indonesia. Pembahasan merupakan analisis yang dibagi berdasarkan kategori yang sudah ditentukan dalam proses *literatur review*, yaitu penerapan, dukungan dan tantangan serta dampak *E-Participation*.

• Penerapan *E-Participation* di Indonesia

Penerapan *E-participation* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan diperkenalkannya berbagai platform digital seperti LAPOR! dan *E-Musrenbang*. Platform LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat adalah saluran utama bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan pelayanan publik secara digital. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022) menyebutkan bahwa jumlah laporan yang masuk melalui LAPOR! meningkat dari 500 ribu laporan pada tahun 2018 menjadi lebih dari 1,5 juta laporan pada tahun 2022.

Namun, peningkatan ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas tindak lanjut dari pemerintah, yang ditunjukkan oleh data bahwa hanya sekitar 45% dari laporan tersebut yang

ditindaklanjuti secara memadai. Data laporan yang diterima platform *LAPOR* bisa dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Laporan Diterima oleh *LAPOR* dari 2018 hingga 2022

Tahun	Jumlah Laporan	Laporan Ditindaklanjuti (%)	Laporan Tidak Ditindaklanjuti (%)
2018	500.000	40	60
2019	750.000	45	55
2020	1.000.000	50	50
2021	1.200.000	47	53
2022	1.500.000	45	55

(Sumber: Kominfo, 2022)

Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah laporan yang masuk terus meningkat setiap tahun. Namun, persentase laporan yang ditindaklanjuti tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem pengelolaan laporan dan tindak lanjut, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi atau ketidaksiapan dari segi sumber daya untuk merespon laporan dengan cepat dan tepat. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas platform *E-participation* yang ada, dan berpotensi mengurangi partisipasi mereka di masa mendatang.

Selain itu, *E-participation* di Indonesia juga masih menghadapi tantangan besar dalam hal inklusivitas. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2022), penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 77,02% pada tahun 2022. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah. Di perkotaan, penetrasi internet mencapai 89,02%, sementara di pedesaan hanya 64,65%. Ketimpangan ini menyebabkan banyak masyarakat di wilayah pedesaan yang tidak dapat terlibat dalam proses *E-participation*. Terutama di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih terjadi ketimpangan. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut kurang terwakili dalam proses *E-participation*.

Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam *E-participation*. Laporan Unesco (2021) menyebutkan, hanya 31% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital yang memadai. Artinya, meskipun akses internet tersedia, banyak masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Distribusi literasi digital di Indonesia bisa dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Distribusi Literasi Digital Indonesia

Kelompok Usia	Tingkat Literasi Digital Memadai (%)
15-24 tahun	45
25-34 tahun	35
35-44 tahun	28
45-54 tahun	20
55+ tahun	15

(Sumber: UNESCO, 2021)

Data pada Tabel 11 memperlihatkan bahwa literasi digital tertinggi terdapat pada kelompok usia muda (15-24 tahun), sementara kelompok usia yang lebih tua cenderung memiliki literasi digital yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam *E-participation*. Program literasi digital perlu diperluas cakupannya, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek kritis dan etis dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang baik tidak hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga tentang kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, berpartisipasi secara efektif dalam diskusi kebijakan, dan memahami hak-hak digital sebagai warga negara.

- **Tantangan Implementasi *E-participation* di Indonesia**

Tidak meratanya akses internet menjadi tantangan terbesar dalam implementasi *E-participation* di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan bahwa sekitar 22% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses internet. Peningkatan akses internet hanya terjadi di wilayah perkotaan, sementara di daerah pedesaan dan terpencil masih sangat terbatas. Ketimpangan ini membuat masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sulit untuk terlibat dalam proses kebijakan yang dilakukan secara digital. Ketimpangan juga terjadi pada rumah tangga pemilik akses internet, yang datanya bisa dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Persentase Rumah Tangga Pemilik Akses Internet di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2021

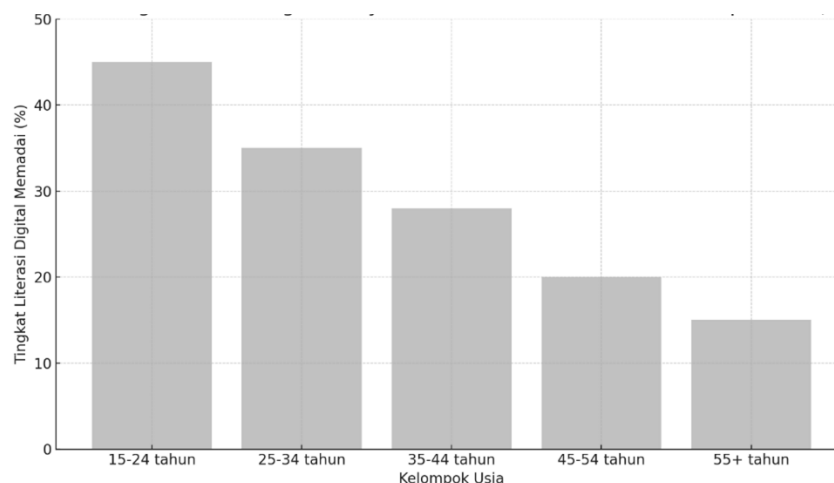
Wilayah	Akses Internet Rumah Tangga (%)
Perkotaan	78
Pedesaan	52
Jawa	75
Sumatera	65
Kalimantan	60
Sulawesi	55
Papua	40

(Sumber: BPS, 2021)

Data pada Tabel 12 menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap internet di wilayah pedesaan masih jauh tertinggal dibanding wilayah perkotaan. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat di wilayah pedesaan cenderung tidak terlibat dalam proses *E-participation*, baik karena keterbatasan akses maupun karena kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan platform digital untuk berpartisipasi dalam kebijakan.

Selain masalah akses, rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Survei APJII (2022) menyebutkan bahwa sekitar 29% penduduk Indonesia belum memahami cara menggunakan internet dengan benar. Ini mencakup ketidakmampuan untuk mencari informasi yang akurat, berkomunikasi dengan baik di dunia maya, serta menggunakan platform digital untuk tujuan yang konstruktif. Literasi digital yang rendah ini bisa menghambat kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam partisipasi kebijakan. Tingkat literasi digital masyarakat dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Tingkat Literasi Digital Masyarakat Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021



(Sumber: APJII, 2022)

Grafik 1 memperlihatkan bahwa literasi digital tertinggi berada pada kelompok usia muda (15-24 tahun). Sementara kelompok usia yang lebih tua cenderung memiliki literasi digital yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam *E-participation*. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan.

- **Dukungan dan Tantangan dari Perspektif Pemerintah**

Dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *E-participation* di Indonesia. Untuk hal ini, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program, seperti *Gerakan 100 Smart City* dan program *Digital Talent Scholarship* untuk mendorong partisipasi digital masyarakat dan meningkatkan literasi digital (Kominfo, 2022). Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan platform *E-participation*. Platform yang telah dikembangkan secara independen oleh berbagai kementerian dan lembaga, seperti *LAPOR!*, portal *E-Musrenbang*, dan portal konsultasi publik, sering kali terkesan berjalan tanpa koordinasi yang baik sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang saluran yang tepat untuk menyampaikan masukan mereka. Fragmentasi ini juga menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan laporan dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas partisipasi digital itu sendiri (Purwanto & Pratama, 2020).

Selain itu, resistensi birokrasi terhadap penggunaan teknologi digital juga menjadi salah satu tantangan signifikan. Banyak pejabat pemerintah, terutama di tingkat daerah, masih lebih nyaman menggunakan metode partisipasi tradisional dibandingkan teknologi digital. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kominfo (2021), sebanyak 35% pejabat daerah menyatakan bahwa mereka merasa kurang percaya diri untuk menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan mereka, sementara 25% lainnya mengkhawatirkan masalah keamanan data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan politik di tingkat pusat, implementasi kebijakan partisipasi digital sering kali terhambat di tingkat operasional karena kurangnya kompetensi dan kesiapan teknis di kalangan aparat pemerintah. Hasil survei tersebut bisa dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Survei Sikap Birokrat Terhadap *E-Participation* di Berbagai Tingkat Pemerintahan

Persepsi	Persentase Pejabat Pemerintah (%)	Deskripsi
Mendukung penuh	20	Pejabat yang mendukung penggunaan teknologi digital sepenuhnya.
Mendukung dengan kekhawatiran	30	Mendukung, tetapi memiliki kekhawatiran tentang efektivitas dan keamanan.
Netral	25	Tidak memiliki pendapat yang kuat terhadap penggunaan teknologi digital.
Menolak	25	Menolak penggunaan teknologi digital karena preferensi metode tradisional.

(Sumber: Kominfo, 2021)

Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa sekitar 45% birokrat masih ragu atau menolak penggunaan teknologi digital untuk partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperluas *E-participation* membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan yang lebih baik bagi aparat pemerintah dan insentif bagi mereka yang berhasil mengadopsi teknologi

digital. Tanpa dukungan yang kuat dari birokrasi, platform *E-participation* yang ada tidak akan dapat berfungsi dengan optimal.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan masalah keamanan data yang menjadi kekhawatiran besar di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat. Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan adanya beberapa kasus kebocoran data yang melibatkan platform digital pemerintah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih kuat terkait perlindungan data pribadi, serta meningkatkan keamanan pada platform *E-participation*. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme umpan balik yang lebih jelas dan transparan, agar masyarakat dan birokrat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan platform digital untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan.

- **Dampak *E-participation* terhadap Kualitas Kebijakan Publik**

Implementasi *E-participation* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Partisipasi masyarakat yang lebih luas dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan memasukkan perspektif yang lebih beragam, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Fung, 2015). Namun, di Indonesia, dampak *E-participation* terhadap kualitas kebijakan masih terbatas, karena berbagai tantangan dalam implementasinya.

Salah satu indikator utama dari dampak *E-participation* terhadap kualitas kebijakan adalah peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Platform seperti *LAPOR!* dan *E-Musrenbang* memberikan masyarakat akses langsung untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan yang sedang dirumuskan. Namun, masalah yang sering muncul adalah kurangnya umpan balik dari pemerintah terkait tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan. Survei *Katadata Insight Center* (2021) menyebutkan bahwa hanya 45% masyarakat yang merasa laporan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Ini menunjukkan, meskipun masyarakat dapat berpartisipasi secara digital, namun efektivitas partisipasi ini masih terbatas.

E-participation juga memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat secara langsung mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan umpan balik jika terdapat penyimpangan. Kurang mampunya pemerintah untuk merespon partisipasi masyarakat secara efektif menjadi masalah yang harus diatasi. Banyak laporan yang masuk melalui platform *E-participation* tidak ditindaklanjuti atau hanya mendapatkan respon formalitas tanpa tindakan nyata. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas *E-participation* menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Persepsi masyarakat terhadap *E-Participation* dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak E-Participation Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Dampak <i>E-participation</i>	Persentase Masyarakat (%)
Peningkatan Transparansi	48
Peningkatan Akuntabilitas	42
Tidak Ada Dampak Signifikan	30

(Sumber: *Katadata Insight Center*, 2021)

Data pada Tabel 14 memperlihatkan sebagian masyarakat telah merasakan adanya dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, sebanyak 30% masyarakat masih merasa bahwa *E-participation* tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun *E-participation* memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kebijakan, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan luas.

Dampak lain yang dapat ditimbulkan oleh *E-participation* adalah peningkatan inklusivitas dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi digital memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan pandangan mereka secara lebih mudah dan cepat. Namun, tantangan ketimpangan akses internet dan rendahnya literasi digital masih menjadi penghalang utama bagi inklusivitas

partisipasi. Masyarakat di pedesaan dan terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses *E-participation*, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan dampak *E-participation* terhadap kualitas kebijakan, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet, serta memperluas program literasi digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa masukan dari masyarakat benar-benar diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan, agar *E-participation* dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia.

SIMPULAN

Penerapan *E-participation* di Indonesia berdasarkan studi-studi sebelumnya menunjukkan kecenderungan belum optimal dalam implementasinya. Kajian dalam artikel ini menunjukkan adanya beberapa kemajuan signifikan, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi terutama terkait dampak *E-participation* terhadap kualitas kebijakan publik. Platform seperti LAPOR! dan *E-Musrenbang* telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara digital dalam proses pengambilan keputusan, namun efektivitasnya masih terganggu oleh keterbatasan dalam hal tindak lanjut dan umpan balik dari pemerintah. Data menunjukkan, meskipun jumlah laporan yang masuk melalui LAPOR! terus meningkat, persentase laporan yang ditindaklanjuti tetap stagnan, dengan banyak laporan yang tidak mendapatkan respon yang memadai.

Hasil *literature review* menunjukkan bahwa ketimpangan akses internet dan rendahnya literasi digital di berbagai wilayah Indonesia menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan potensi *E-participation*. Masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil cenderung terpinggirkan dalam proses partisipasi digital karena keterbatasan akses dan pengetahuan tentang teknologi digital. Rendahnya tingkat literasi digital, terutama di kalangan kelompok usia yang lebih tua, juga memperburuk situasi ini.

Dukungan politik dari pemerintah pusat untuk mempromosikan partisipasi digital sangat penting. Program seperti *Gerakan 100 Smart City* dan *Digital Talent Scholarship* telah memberikan dorongan yang signifikan, tetapi implementasinya di tingkat daerah sering kali terhambat oleh resistensi birokrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kekhawatiran terkait keamanan data. Hasil *literature review* menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintah daerah masih enggan mengadopsi teknologi digital dalam proses kebijakan karena alasan-alasan tersebut.

Dampak *E-participation* terhadap kualitas kebijakan publik, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas, masih terbatas. Meskipun platform *E-participation* memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka secara lebih luas, banyak masukan yang tidak diintegrasikan dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Ini menyebabkan partisipasi digital menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan dari analisis berdasarkan *literature review*, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi *E-participation* di Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik. *Pertama*, peningkatan akses dan infrastruktur digital. Pemerintah perlu berfokus pada pembangunan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses platform *E-participation*. Pembangunan jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi kunci dalam memperluas partisipasi digital masyarakat.

Kedua, penguatan literasi digital. Program literasi digital harus diperluas cakupannya agar mencakup tidak hanya kelompok usia muda dan pekerja, tetapi juga kelompok usia yang lebih tua dan masyarakat di daerah terpencil. Program literasi ini tidak hanya harus mencakup aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga aspek kritis seperti kemampuan untuk menilai informasi secara benar dan etis dalam menggunakan teknologi digital.

Ketiga, koordinasi antarinstansi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi antara berbagai platform *E-participation* yang ada, sehingga masyarakat tidak bingung dalam menggunakan saluran yang tepat untuk berpartisipasi. Integrasi ini juga akan

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan laporan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat respons pemerintah terhadap masukan yang diberikan.

Keempat, peningkatan keamanan data. Untuk mengatasi kekhawatiran terkait keamanan data, pemerintah harus memperkuat regulasi dan infrastruktur keamanan digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan perlu segera diimplementasikan dengan baik untuk memastikan bahwa data masyarakat yang terlibat dalam platform *E-participation* aman dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan.

Kelima, mekanisme umpan balik yang lebih transparan. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme umpan balik yang lebih transparan dan akuntabel untuk setiap laporan atau masukan yang diberikan melalui platform *E-participation*. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa partisipasi mereka dihargai dan berkontribusi langsung terhadap pengambilan keputusan publik.

Keenam, pelatihan bagi birokrat. Untuk mengatasi resistensi birokrasi terhadap teknologi digital, pemerintah perlu menyediakan pelatihan yang komprehensif tentang manfaat dan penggunaan *E-participation*. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis, manajerial, serta perubahan budaya kerja yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Dinoroy Marganda, The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia, *European Scientific Journal*, Vol. 13, No. 34, 2017, Doi: 10.19044/esj.2017.v13n35p99
- Ariwati, Ristekawati, Siti Fadilah, Febriliantina, Ricka, Zakiah, The study of e-Government implementation in improving the quality of public services (A study on society in Bandung region), *International Conference on ICT For Smart Society (ICISS)*, Juli, 2016, DOI: 10.1109/ICTSS.2016.7792858
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). *Laporan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia tahun 2022*. <https://apjii.or.id>
- Ayuning Budi, Nur Fitriah, Fitriani, Widia Resti, Hidayanto, Achmad Nizar, Kurnia, Sherah, Inan, Dedi Iskandar, A study of government 2.0 implementation in Indonesia, *Socio-Economic Planning Sciences*, Juli, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100920>
- Aziz, Muhammad Saiful, Husna, Sofia, The Problem of E-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia, *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICSOSAPS 2020)*, DOI: 10.2991/assehr.k.201219.071
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2021*. <https://bps.go.id>
- Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2015). Citizens' engagement on local governments' Facebook sites: An empirical analysis of six large Spanish cities. *Government Information Quarterly*, 32(1), 30-42. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.11.001>
- Budi, Nur Fitriah Ayuning, et al. 2020. A study of government 2.0 implementation in Indonesia. *Socio-Economic Planning Sciences* Volume 72, December 2020, 100920. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038012119301296>
- Farida, I, Lestari A, Implementation of E-Government as a Public Service Innovation in Indonesia, *RUDN Journal of Public Administration*, 8(1), 2021: 72–79. DOI: 10.22363/2312-8313-2021-8-1-72–79
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Katadata Insight Center. (2021). *Survei persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui E-participation*. Jakarta: Katadata Insight Center.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2021). *Laporan tahunan Gerakan 100 Smart City dan Digital Talent Scholarship*. <https://kominfo.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2022). *LAPOR!: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 2022*. <https://lapor.go.id>
- Kies, R., & Wojcik, S. (2019). *E-participation* and the transformation of democratic states: The case of the European Union. In A. Macintosh & E. Tambouris (Eds.), *Electronic Participation: Proceedings of the 9th IFIP WG 8.5 International Conference on ePart 2019* (pp. 23-34). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20613-3_3
- Linders, D. (2016). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446–454. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003>
- Lindgren, I., & van Veenstra, A. F. (2018). E-government adoption and diffusion: A cross-country analysis. *Government Information Quarterly*, 35(2), 345–359. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.007>
- Medaglia, R. (2017). The diffusion of *E-participation* in European countries: An empirical analysis. *European Journal of ePractice*, 7(1), 23-44. <https://doi.org/10.4018/ijegr.2017010102>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2015). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Nulhusna, Rizqa, Sandhyaduhita, Puspa, Hidayanto, Achmad Nizar, & Phusavat, Kongkiti "The relation of e-government quality on public trust and its impact towards public participation", *Transforming Government: People, Process and Policy*, doi.org/10.1108/TG-01-2017-0004
- Panopoulou, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2014). *E-participation* initiatives: How is Europe progressing?. *European Journal of ePractice*, 12(1), 15-26.

- Park, E., & Joo, S. (2020). Influence of digital literacy and digital competence on the intention to use digital technology: A case study of the digital talent in Korea. *Journal of Digital Literacy and Competence*, 2(1), 12-24. <https://doi.org/10.1016/j.jdlc.2020.02.003>
- Purwanto, A., & Pratama, R. (2020). Barriers to *E-participation* in Indonesian local government: Challenges for inclusive public participation. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(2), 234-252. <https://doi.org/10.5296/jpag.v10i2.16682>
- Sari, Annisa Monicha, Hidayanto, Sari A. Nizar, Purwandari, Betty, Ayuning Budi, Nur Fitriah, & Kosandi, Meidi, Challenges and Issues of E-Participation Implementation: A Case Study of E-Complaint Indonesia, Proceedings of The 3rd International Conference on Informatics and Computing, ICIC, 2018
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susanti, Elisa, Harta, Ridho, Agus Diana, Bambang, Utama, Sawitri Budi, E-Readiness and The Effectiveness of E-Participation in Indonesia. *Mimbar*, Vol. 37, No. 1, 2021, 138-149
- Susha, I., Grönlund, Å., & Janssen, M. (2015). Driving factors of service innovation using open government data: An exploratory study of entrepreneurs in two countries. *Information Polity*, 20(1), 19-34. <https://doi.org/10.3233/IP-150353>
- UNESCO. (2021). *Laporan literasi digital di Asia Tenggara*. <https://unesco.org>
- Vindrola-Padros, C. & Johnson, G.A., 2020, Rapid Techniques in Qualitative Research: A Critical Review of the Literature, *Qualitative Health Research*, 30(10), 1596–1604.
- Wirtz, B. W., Daiser, P., & Binkowska, B. (2018). *E-participation*: A strategic framework. *International Journal of Public Administration*, 41(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1280818>
- World Bank. (2021). *E-government development index 2021*. <https://worldbank.org>